

MEMBAWA EKOFEMINISME DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH

Azril Azifambayunasti*

azril.azifambayunasti.fis@um.ac.id(*)

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang 5 Malang, 65155, Indonesia.

Article history:

Received 19 April 2026; Revised 27 May 2026; Accepted 20 June 2026; Published 30 June 2026

Abstract: This study wants to explore the importance of ecofeminism narratives in history learning. Ecofeminism is a crucial topic regarding environmental and women's issues. This topic is largely absent from classrooms, when in fact it closely related to society. The continued exploitation of the environment and marginalization of women demonstrate how society views its surroundings in a dualistic and hierarchical perspective, allowing for the perpetuation of the dominance of one party over another. In this regard, history learning is seen as a crucial arena for introducing ecofeminist studies because it holds strategic power and position in deconstructing perspectives on the environment, women, and their interrelationships. On the other hand, history learning itself remains androcentric, elitist, and anthropocentric, necessitating discussions on the roles of women and the environment. This study was compiled through a literature review examining ecofeminist theory and relevant learning theories. As a result, integrating ecofeminism into history learning is not simply about adding material regarding the environment and women issue, but rather an effort to fundamentally shift students' perspectives in understanding the agency, cause and effect, and meaning of events related to the environment, women, and their relationship in history.

Keywords: Ecofeminism, history learning, nature, women

Abstrak: Kajian ini berupaya mengeksplorasi pentingnya narasi ekofeminisme dalam pembelajaran sejarah. Ekofeminisme menjadi pembahasan yang penting mengingat isu lingkungan dan perempuan yang sesungguhnya sangat dekat dengan masyarakat justru absen dalam kegiatan pembelajaran. Lingkungan yang terus dieksploitasi dan perempuan yang masih tetap termarginalkan hingga saat ini menunjukkan bagaimana masyarakat memandang hal-hal di sekitarnya secara dualistik dan hierarkis, sehingga dominasi satu pihak terhadap pihak lain mudah dilanggengkan. Dalam hal ini, pembelajaran sejarah dipandang sebagai satu arena penting untuk membawa kajian ekofeminisme karena ia mempunyai kekuatan dan posisi yang strategis dalam mendekonstruksi cara pandang terhadap lingkungan, perempuan dan keterkaitan antara keduanya. Di sisi lain, pembelajaran sejarah sendiri juga masih androsentris, elitis, dan antroposentris, sehingga perlu ruang untuk pembahasan terkait peran perempuan dan lingkungan. Kajian ini disusun melalui studi literatur dengan mengkaji teori ekofeminisme dan teori-teori pembelajaran yang relevan. Hasilnya, membawa ekofeminisme dalam pembelajaran sejarah bukan sekadar menambahkan materi tentang

lingkungan dan perempuan, tetapi lebih pada upaya untuk mengubah cara pandang peserta didik secara fundamental dalam memahami agensi, sebab akibat, dan makna dari peristiwa terkait lingkungan, perempuan, dan hubungan keduanya dalam sejarah.

Kata kunci: Ekofeminisme, lingkungan, pembelajaran sejarah, perempuan

PENDAHULUAN

Isu lingkungan dan perempuan sesungguhnya begitu dekat dengan keseharian manusia. Namun, ironisnya justru menjadi pembahasan yang sangat jauh dari ruang-ruang kelas formal. Secara terpisah, lingkungan dan perempuan seringkali absen dalam pembelajaran, begitu juga dengan relasi antara keduanya sebagai kajian ekofeminisme. Seperti yang dikatakan Warren (2000) bahwa keterkaitan antara lingkungan dan perempuan seringkali tidak ditampakkan dalam berbagai teori dan institusi. King (1983) juga menegaskan bahwa krisis lingkungan selalu menjadi bagian dari perjuangan perempuan, tapi sistem pendidikan terus memisahkan keduanya. Padahal menurut Shiva (1988), memisahkan perempuan dengan isu lingkungan sama dengan mengabaikan pengetahuan serta bagaimana mereka bekerja setiap waktu untuk menopang keberlangsungan dan keseimbangan lingkungan.

Melihat realita hari ini, lingkungan terus digempur krisis. Di Indonesia, berbagai proyek pembangunan dan pertambangan yang terus dilakukan secara eksploitatif menimbulkan degradasi ekosistem dan potensi besar bencana ekologis. Berdasarkan catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), alih fungsi hutan yang serampangan demi ekonomi jangka pendek menyebabkan potensi laju deforestasi pada tahun 2025 bisa mencapai 600 ribu hektar. Pulau-pulau kecil telah banyak ditambang dan mengancam ekosistem laut serta kehidupan masyarakat pesisir. Rusaknya lingkungan tidak diiringi dengan penegakan hukum yang konsisten dan serius. Bahkan, pihak-pihak yang mempertahankan lingkungannya tidak jarang justru dikriminalisasi (Iryanti, 2025). Sebuah realita yang merupakan resiko ketika alam dengan kekayaannya hanya dipandang sebagai *resources* atau sumber daya dan terus dieksploitasi secara masif tanpa kendali. Hukum tidak bisa diandalkan, dan korbannya adalah masyarakat adat yang seringkali tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait eksploitasi lingkungannya. Dalam hal ini, perempuan juga turut menjadi korban.

Mengutip King (1983), perjuangan alam adalah perjuangan perempuan. Alam dan lingkungan dieksploitasi dalam sistem kapitalisme, sedangkan perempuan dieksploitasi di bawah patriarki. Bertemunya alam dan perempuan dalam posisi yang sama tidak dapat dilepaskan dari kebiasaan berpikir dualis dan hierarkis, memandang ada pihak yang unggul dan lemah, membenarkan devaluasi dan dominasi. Kebiasaan berpikir manusia dengan perspektif semacam itu diproyeksikan pada bagaimana mereka kemudian memandang alam. Shiva (1988) menyatakan bahwa alam dan perempuan mengalami pergeseran dari sumber dan penopang kehidupan menjadi sumber daya, suatu obyek lain yang bisa ditundukkan dan dieksploitasi. Dengan demikian, maka krisis lingkungan

dan alienasi terhadap perempuan berada di titik yang sama. Bahkan, keduanya juga berkaitan satu sama lain. Sepanjang sejarah, perempuan telah menjalankan peran vital menjaga alam dan lingkungan sekitarnya. Pemikiran dan gerakan yang berupaya melepaskan keduanya dari konstruksi dualisme dan hierarki kemudian disebut dengan ekofeminisme.

Istilah ekofeminisme pertama kali muncul dalam tulisan Francoise d'Eaubonne tahun 1974 yang menyuarakan perjuangan revolusioner feminis untuk kelangsungan ekologi. Sebuah revolusi yang bertujuan membuka jalan untuk relasi yang egaliter, bukan untuk kepentingan kekuasaan patriarki. Hubungan hierarkis yang menempatkan alam dan perempuan sebagai obyek harus diganti dengan hubungan timbal balik (Howell & et al, 2023). Menurut Fahimah (2017), ekofeminisme merupakan ide bahwa perempuan dan alam ada di titik yang sama, yakni menjadi objek ketidakadilan dan penindasan. Alam yang terus menderita krisis, seiring dengan dominasi terhadap perempuan yang masih terus mengakar kuat dipandang sebagai dampak dari praktik androsentris yang maskulin dan menindas (Maulana & Supriatna, 2019). Berdasarkan konsep ekofeminisme yang telah dipaparkan, lalu mengapa ia perlu untuk muncul dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran sejarah?

Ada dua hal yang mendorong urgensi ekofeminisme dalam pembelajaran sejarah. Pertama yaitu materi pembelajaran sejarah yang cenderung politis dan androsentris, sehingga pembahasan terkait lingkungan dan perempuan seringkali terabaikan. Materi sejarah yang disajikan dalam kurikulum dan dimaknai oleh peserta didik tidak lepas dari pengalaman dan memori kolektif, sehingga sangat rentan politisasi (Gibson et al., 2025). Di Indonesia, materi sejarah dalam kurikulum umumnya sejalan dengan historiografi nasional. Padahal, historiografi nasional hingga saat ini masih banyak berfokus pada penjelasan politik dan narasi orang-orang besar, termasuk laki-laki dan militer (G. F. Kurniawan et al., 2019; Purwanto, 2001). Kuntowijoyo (2003) juga menyebutnya androsentris, dan materi tersebut divalidasi dengan tampil dalam buku teks sejarah, buku resmi dalam pembelajaran. Sudah banyak riset tentang representasi perempuan di berbagai periode sejarah Indonesia dalam buku teks yang menunjukkan bahwa eksistensi dan peran perempuan belum ditampilkan secara berimbang (Azifambayunasti, 2023; Utama, 2024). Begitu juga dengan isu lingkungan, ia juga belum dinarasikan secara optimal dalam buku teks sejarah (Ahmad, 2016; Kusnoto, 2022).

Alasan kedua, pembelajaran sejarah merupakan suatu arena atau ruang dekonstruksi dan rekonstruksi narasi. Sejalan dengan riset Epstein (2016), pembelajaran sejarah umumnya menjadi tempat untuk membangun identitas melalui konstruksi naratif. Dengan demikian, ia juga memungkinkan menjadi arena dekonstruksi cara pandang dualistik dan merekonstruksi pemahaman bahwa krisis lingkungan dan penindasan terhadap perempuan dalam lintasan sejarah harus diakhiri. Djono et al. (2020) juga memaparkan bahwa pembelajaran sejarah sudah selayaknya dekonstruktif, mendorong individu untuk menganalisis, memahami dan menemukan suatu masalah, kemudian melakukan dekonstruksi dan merekonstruksi kembali untuk membentuk sistem yang lebih baik. Dengan demikian, ekofeminisme diharapkan dapat menjadi pembahasan baru yang tidak hanya

sekadar memperkaya materi pembelajaran sejarah, tapi juga mendorong dekonstruksi cara pandang terhadap alam dan perempuan dengan mengkaji perjalanannya dalam lintasan sejarah.

METODE

Tulisan ini disusun melalui metode kajian pustaka. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan dan menyeleksi sumber berupa artikel jurnal, buku, serta publikasi akademik lain yang relevan dengan topik. Setelah itu, mengutip Cresswell (2010), peneliti membuat peta literatur untuk menggambarkan bagaimana penelitian yang akan dilakukan memberikan kontribusi bagi kajian yang sudah ada. Dalam hal ini, literatur yang dikumpulkan dan diidentifikasi adalah buku dan artikel jurnal terkait ekofeminisme, gerakan ekofeminisme di Indonesia, pembelajaran sejarah dan permasalahannya yang androsentris dan politis, isu lingkungan dan perempuan dalam sejarah Indonesia, serta teori yang mendukung pembelajaran sejarah kritis.

Beberapa literatur tersebut di antaranya: 1) *Staying Alive: Women, Ecology and Development* yang ditulis Vandana Shiva; 2) *Healing the Wounds* yang ditulis Ynestra King; 3) *Ecofeminist Philosophy* yang ditulis Karen J. Warren; 4) *Ecofeminism: Linking Theory and Practice* yang ditulis Janis Birkeland; 5) *Ekofeminisme: Arah Baru dan Apa yang Perlu Kita Ketahui*, ditulis Nancy R. Howell, dkk.; 6) *Pendidikan Kaum Tertindas* yang ditulis Paulo Freire; 7) *Breaking Boundaries: Ecofeminism in the Classroom* oleh Gardner & Riley; dan 8) *Ecofeminism and Experiential Learning: Taking the Risks of Activism Seriously* oleh Jeannie Ludlow., serta beberapa artikel lain tentang ekofeminisme dalam pembelajaran. Literatur yang telah diidentifikasi dan disusun kemudian dianalisis secara tematik berkaitan dengan tema atau konsep yang serupa dari berbagai literatur yang dikaji, untuk bisa disintesis menjadi ulasan pedagogis tentang bagaimana ekofeminisme dapat diintegrasikan dalam pembelajaran sejarah. Sesuai dengan pandangan Cresswell (2010), kajian pustaka tidak hanya menggabungkan penjelasan yang sudah ada, tapi juga membangun jembatan di antara topik-topik terkait dan menyusun sintesis dengan menyesuaikan isu sentral yang tengah dikaji. Melalui proses ini, tulisan diharapkan dapat menawarkan kajian kritis terkait urgensi menghadirkan ekofeminisme dalam pembelajaran sejarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekofeminisme: Alam dan Perempuan di Indonesia

Secara sederhana, ekofeminisme adalah pertemuan antara ekologi dan feminisme (Van Klinken, 2025). Istilah ekofeminisme pertama kali muncul sebagai bagian dari gerakan feminisme di tahun 1970-an, tepatnya dalam *Le féminisme ou la mort (Feminism or Death)*, tulisan Francoise d'Eaubonne yang memandang bahwa kuasa laki-laki dalam sistem patriarki lah yang paling bertanggungjawab dalam perusakan lingkungan (Howell & et al, 2023). Dari situ, diketahui bahwa latar belakang munculnya konsep ekofeminisme adalah perusakan lingkungan yang semakin masif, yang dipandang sebagai hasil pola dominasi yang sama dengan bagaimana sistem patriarki merepresi perempuan dan mendorong munculnya feminisme. Keterkaitan antara lingkungan yang

terus dieksploitasi dengan perempuan di bawah sistem patriarki, menurut Wulan (2007) tidak hanya ada pada pola dominasinya, tapi juga realita bahwa perempuan kemudian menjadi pihak yang paling rentan terhadap dampak dari kerusakan lingkungan.

Menurut (Van Klinken 2025), selama ini alam dan perempuan telah didominasi dan diceleahkan oleh laki-laki, padahal keduanya adalah simbol pengasuhan dalam menjaga kehidupan di bumi. Birkeland (1993) kemudian menegaskan bahwa ekofeminisme lebih dari sekadar nilai, gerakan sosial, dan praktik. Perusakan lingkungan yang beriringan dengan dominasi terhadap perempuan, serta perempuan yang kemudian menanggung akibat dari kerusakan lingkungan, sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang kolonialisme. Mies dan Shiva (1993) dalam bukunya *Eco-Feminism* menjelaskan bagaimana wilayah Selatan dieksploitasi oleh negara-negara dari Utara (masyarakat kulit putih) selama era kolonisasi hingga saat ini. Mereka membawa pandangan dualistik dan maskulin, sehingga merasa mempunyai kekuasaan atas alam negara-negara di Selatan. Tidak hanya alam, kolonisasi juga dilakukan terhadap manusia, terhadap perempuan.

King (1983) juga menyinggung bagaimana pembangunan dan industrialisasi ala Barat berdampak pada kerusakan alam, dan perempuan yang dipandang dekat dengan alam pun tidak luput dari objektifikasi. Keduanya kemudian menjadi *other* atau *liyan*, sesuatu yang berbeda dari pihak yang mempunyai kuasa, sehingga tampak sah untuk sepenuhnya dikuasai. Begitu juga dengan penjelasan Mies (2021) bahwa kolonisasi sejak abad ke-16 datang bersama kapitalisme dan imperialisme bersamaan pula dengan penghancuran otonomi perempuan atas tubuh dan kehidupan mereka. Di Indonesia, kita juga melihat bagaimana kolonisasi mengeksploitasi hasil alam dan menempatkan masyarakat dalam stratifikasi sosial yang banyak merugikan perempuan. Ironisnya, hal serupa masih berjalan hingga saat ini dengan balutan modernisasi.

Sebelum era kolonisasi dan masifnya eksploitasi alam, perempuan dan alam telah memiliki interkoneksi tersendiri yang cukup kuat. Van Klinken (2025) menyebutkan sudah sejak lama perempuan menjadi pahlawan dalam menjaga alam dan lingkungan, bahkan sebelum istilah ekofeminisme itu sendiri muncul. Dalam *Staying Alive*, Shiva (1988) juga menjelaskan bagaimana perempuan di India mempunyai keterikatan erat dengan hutan, jauh sebelum wilayah mereka dikuasai Inggris. Hutan telah menjadi poros peradaban masyarakat India, dengan Dewi Aranyani sebagai penjaganya. Hutan dipandang sebagai sumber kehidupan, di mana kekayaannya selama ini digunakan oleh masyarakat, terutama perempuan, untuk bertahan hidup. Di Indonesia, kita mengenal tradisi Sasi yang umum dijalankan oleh masyarakat Indonesia Timur. Mengutip Riyanto (2024), Sasi adalah sistem adat yang dijalankan oleh masyarakat Papua dan Maluku, dengan tujuan mengatur pemanfaatan kekayaan alam, baik di darat maupun di laut. Masyarakat diperbolehkan mengambil hasil laut dan hutan ketika Sasi dibuka, dan berhenti jika Sasi telah ditutup. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada alam yang telah memberikan sumber kehidupan, sehingga ia pun harus dijaga dan dipertahankan kelestariannya.

Penghormatan terhadap alam tidak hanya tampak pada bagaimana mereka mengatur pemanfaatannya, tapi juga pada perlawanan yang dilakukan ketika alam terancam perusakan. Dalam

bukunya, Warren (2000) memaparkan gerakan protes yang dilakukan oleh kelompok perempuan di India pada tahun 1974. Peristiwa tersebut disebut sebagai *Chipko Movement*, di mana mereka mengancam akan memeluk pohon-pohon yang akan ditebang secara masif. Gerakan tersebut sukses mencegah penebangan pohon pada wilayah seluas 12.000 kilometer persegi yang juga merupakan wilayah aliran sungai. Van Klinken (2025) juga menjelaskan protes yang diinisiasi oleh Lois Gibbs di Love Canal, Amerika Serikat. Pada 1978, Gibbs sebagai representasi masyarakat pekerja kulit hitam memobilisasi perempuan di sekitarnya untuk menentang pembuangan limbah beracun di perkempungan kelas pekerja.

Gerakan kelompok perempuan sebagai garda terdepan dalam menjaga alam juga banyak ditemui di Indonesia. Sejak era VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*), harmoni antara alam dan masyarakat dirusak. VOC tidak hanya mengeksploitasi rempah-rempah, tapi juga melakukan penguasaan terhadap 120 juta hektar hutan. Mereka banyak memanfaatkan pohon jati untuk membangun kapal, benteng, dan kantornya (Galudra & Sirait, 2009). Pada abad ke-19, orang-orang Belanda mulai mencatat 53 lokasi dengan potensi minyak di Sumatra, Jawa, dan Kalimantan serta melakukan pengeboran sumur minyak pertama di Jawa Barat pada tahun 1871, meskipun komersialisasi baru dilakukan di tahun 1880-an (Djuang, n.d.). Pada kurun waktu yang sama, seiring dengan diberlakukannya kebijakan agraria, pemerintah kolonial juga membuka perkebunan skala besar dengan komoditas seperti tebu, kopi, karet dan kelapa sawit (Baudoin et al., 2017). Eksploitasi alam tersebut tentu memicu resistensi masyarakat, termasuk juga perempuan. Perlawanan terhadap praktik *cultuurstelsel* terjadi di wilayah Jawa dan Sunda (Ricklefs, 2001), sedangkan di Sumatera Barat, perempuan juga mempunyai peran penting dalam proses penanaman padi, serta tercatat menentang konversi lahan pertanian mereka menjadi perkebunan oleh pemerintah kolonial (Dobbin, 1983).

Resistensi dan upaya konservasi yang dilakukan oleh perempuan tetap muncul hingga saat ini. Astuti (2012) mengungkapkan bahwa para perempuan di Papua pernah melakukan perlawanan dengan berpuisi dan bernyanyi sambil mengitari pepohonan yang akan ditebang oleh suami-suami mereka sendiri, dan aksi tersebut berhasil menggagalkan proyek penebangan hutan. Priyambodo (2024) juga menjelaskan kelompok perempuan Waifuna yang memegang kendali dalam tradisi Sasi di perairan Raja Ampat. Para perempuan ini percaya bahwa mereka memiliki peran alami sebagai penjaga kehidupan, di mana merawat alam sama seperti merawat bayi. Selain itu, ada pula sekelompok perempuan di Aceh yang dikenal sebagai *ranger* penjaga hutan. Dikutip dari BBC News Indonesia (2020), para perempuan ini melakukan patroli di hutan-hutan untuk memastikan tidak ada *illegal logging*, sehingga pasokan air bersih mereka terjaga dan terhindar dari bencana. Meskipun didampingi oleh beberapa laki-laki, tapi para *ranger* perempuan ini terbukti lebih mendengarkan peringatannya ketika berpatroli. Bahkan, menurut Milko dan Alangkara (2024), sebelum patroli hutan dimulai, beberapa perempuan sudah sering melakukan diplomasi dari rumah.

Aksi protes terhadap tindakan perusakan dan eksploitasi alam juga dilakukan oleh sekelompok perempuan di wilayah Gunung Kendeng, Jawa Tengah. Dari waktu ke waktu, perempuan di wilayah

tersebut mempunyai kedekatan yang erat dengan alam sekitar mereka, mulai dari aktivitas domestik hingga pertanian (Fitri & Akbar, 2017). Pegunungan Kendeng adalah wilayah karst yang menyediakan sumber air bersih, sehingga kelompok perempuan “Kartini Kendeng” dengan tegas menolak pembangunan industri semen di wilayah tersebut. Mereka melakukan aksi protes dengan menyemen kaki mereka di luar Istana Kepresidenan Jakarta (Firdaus, 2020). Aksi tersebut juga menggambarkan bagaimana masyarakat Kendeng sangat memahami lingkungan mereka lebih dari kebijakan apapun. Meskipun pada akhirnya pabrik tetap dibangun, tapi aksi tersebut cukup memicu publik untuk kembali menaruh perhatian pada alam (Kunz et al., 2024).

Pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit di Indonesia juga tidak hanya menimbulkan permasalahan lingkungan, tapi juga penindasan terhadap perempuan. Menurut Khalid (2018), munculnya perkebunan kelapa sawit dalam skala besar membuat perempuan kehilangan kontrol dan akses terhadap lingkungannya. Mereka bahkan menjadi pekerja tanpa perlindungan yang jelas. Ada juga perempuan yang terlibat dalam industri ini karena pekerja laki-laki membawa anggota keluarga untuk membantu mencapai target perusahaan tanpa diberi upah tersendiri. Ketika perempuan berjuang mempertahankan ruang hidup dan menolak perkebunan kelapa sawit, mereka justru mengalami kriminalisasi dan kekerasan. Pradipta (2017) juga menjelaskan bahwa para buruh perempuan sering mengalami pelecehan seksual, tapi mereka tidak pernah melaporkan kejadian tersebut. Perusahaan pun kurang melakukan kontrol terhadap potensi terjadinya hal-hal yang merugikan perempuan.

Alam yang dirusak serta perempuan yang terus ditindas, dipinggirkan, dan menerima dampak dari kerusakan alam tentu merupakan permasalahan krusial yang harus disadari oleh setiap individu. Berbagai gerakan yang dilakukan oleh perempuan dalam rangka konservasi dan perlawanan terhadap kerusakan lingkungan, meskipun tidak selalu dilabeli secara eksplisit sebagai gerakan ekofeminisme, tapi tetap mencerminkan keselarasan perjuangan perempuan dan alam itu sendiri. Hal ini tentu sangat penting untuk dibawa dan dipahami melalui proses pembelajaran, supaya pendidikan benar-benar menjadi jalan untuk menyelesaikan masalah nyata yang dekat dengan kehidupan manusia.

Sejarah yang Androsentris, Elitis, dan Antroposentris: Sebuah Upaya Dekonstruksi

Tidak bisa dipungkiri bahwa di Indonesia, kita sangat terbiasa dengan pembelajaran sejarah yang sejalan dengan historiografi nasional. Di sisi lain, historiografi nasional bukan satu hal yang begitu saja diterima oleh publik tanpa kritik. Ia sering disebut androsentris atau berpusat di sekitar laki-laki (Kuntowijoyo, 2003; Purwanto, 2001). Yulia (2016) juga berpendapat bahwa meskipun perempuan beberapa kali ditampilkan dalam narasi sejarah, tapi ia hanya sebagai pelengkap, dikonstruksi dalam narasi patriarki. Periode pra kemerdekaan, menurut Rahayu (2007) dijelaskan dengan banyak dipengaruhi oleh sudut pandang kolonial Belanda. Perempuan yang ditulis umumnya mereka yang melawan seperti Cut Nyak Dhien dan Martha Tiahahu, serta mereka yang sejalan seperti Kartini.

Pada periode revolusi, dengan historiografi fokus pada bela negara, peran perempuan juga dieksklusikan (Wulandari, 2020). Padahal menurut Martyn (2005), pada periode 1950-an, perempuan banyak berpartisipasi dalam pembangunan negara baru dan sistem politik yang demokratis. Perempuan dalam historiografi Indonesia semakin terpinggirkan selama periode Orde Baru, seperti yang dikatakan Blackburn (2004) bahwa dalam historiografi Indonesia modern, pengalaman perempuan dimarginalkan dengan narasi yang hanya berpusat pada figur laki-laki pemimpin dan elit. Kritik terhadap historiografi Indonesia juga disampaikan oleh Kartodirdjo (1992) terkait narasi yang fokus pada pembahasan politik dan perang serta mengabaikan peran masyarakat di lingkup mikro. Hal ini selaras dengan penjelasan Purwanto (2001) bahwa historiografi Indonesia hanya menulis hal-hal yang dianggap memberikan signifikansi besar dan berdimensi politik, sehingga sejarah tentang masyarakat sering luput. Tulisan tentang masyarakat justru banyak datang dari para peneliti asing. Kecenderungan ini juga mewaris pada buku teks sejarah yang digunakan dalam pembelajaran yang memuat narasi politis, membahas segelintir orang yang diagungkan, dan diwarnai heroisme.

Pembelajaran sejarah pada akhirnya menjadi tempat di mana penguasa menegaskan kepentingannya serta membentuk memori kolektif dan paradigma yang homogen (Mahardika, 2020). Hal tersebut juga dapat dilihat dari keberadaan buku teks sejarah, yang dari waktu ke waktu menggunakan pola yang sama, yaitu mengedepankan heroisme dan membangun narasi yang tidak seimbang dengan mengukuhkan penguasa (Susanto et al., 2022). Narasi sejarah yang androsentris, politis, dan berpusat pada elit, baik dalam historiografi maupun kurikulum, kemudian turut menutup ruang bagi narasi soal lingkungan. Menurut Boomgard (2008), sejarawan selama ini hanya tertarik pada perang dan raja-raja, memandang lingkungan sebagai latar atau ruang yang statis tempat terjadinya peristiwa. Padahal, lingkungan pun mengalami dinamika. Ridhoi (2023) juga mengungkapkan bahwa penulisan sejarah lingkungan di Indonesia baru dimulai pada tahun pasca proyek Peter Boomgard tahun 1992 dan masih minim hingga saat ini.

Narasi sejarah yang antroposentris juga tercermin di dalam buku teks sejarah. Menurut Kusnoto (2022), terdapat tema-tema dalam narasi sejarah yang dapat menyampaikan persoalan lingkungan. Namun, narasi sejarah yang menyoal lingkungan tetap tidak banyak dimunculkan. Hal ini didukung oleh pernyataan Farawita (2018) bahwa tema seperti Revolusi Hijau yang seharusnya bisa menjadi ruang untuk membahas isu lingkungan hanya dinarasikan hanya sebagai pencapaian pemerintah Orde Baru. Padahal, seperti yang dikatakan Ahmad (2013), pembelajaran sejarah sudah saatnya dilakukan dengan berwawasan lingkungan. Dengan demikian, dekonstruksi sangat perlu untuk dilakukan dalam pembelajaran sejarah dengan memberikan ruang pada persoalan lingkungan dan perempuan, yang keduanya mempunyai titik temu dalam konsep ekofeminisme.

Ekofeminisme dapat dibahas dalam beberapa periode sejarah Indonesia. Pada periode kolonial, misalnya, persoalan lingkungan yang muncul seiring dengan penguasaan hasil alam selalu beriringan dengan penaklukan terhadap perempuan. Kekuasaan bangsa-bangsa Barat di kepulauan Indonesia tidak hanya terbatas pada eksploitasi alam, tapi juga berpengaruh terhadap posisi perempuan di tengah struktur sosial masyarakat yang semakin teralienasi, padahal pada periode

kerajaan tradisional kita mengenal perempuan-perempuan yang berperan besar dan mencapai puncak kekuasaan. Hal ini didukung oleh pernyataan Andaya (2006) bahwa sebelum kolonisasi bangsa Barat berkembang di Asia Tenggara, perempuan telah memperoleh hak yang setara dengan laki-laki dalam masyarakat, seperti hak politik, hak waris, bahkan kewenangan publik. Reid (1988) juga menjelaskan bahwa perempuan Asia Tenggara sebelum era kolonial umumnya berpendidikan, bahkan memegang peran penting dalam pertanian dan ritual. Kolonial kemudian membawa hukum yang mendisiplinkan gender, mempertegas hierarki, dan mengalienasi perempuan di masyarakat (Locher-Scholten, 2000)

Membicarakan eksploitasi alam dan alienasi terhadap perempuan di periode kolonial Belanda tentu juga menyinggung soal praktik pergundikan, di mana perempuan-perempuan pribumi menjadi pendamping para pegawai kolonial tanpa ikatan pernikahan yang sah. Mereka yang kemudian disebut sebagai nyai, meskipun perannya tidak hanya di ranah domestik, tapi tetap tidak dipandang setara dalam struktur sosial dan hukum pemerintah kolonial (Kurniawan, 2014). Masuknya perempuan ke dalam lingkaran pergundikan seringkali disebabkan oleh tekanan ekonomi, dan perempuan juga yang banyak dirugikan dari praktik ini (Karima, 2017). Periode ini memberikan narasi historis dan banyak persoalan yang dapat dimanfaatkan untuk mendekonstruksi cara pandang sejarah yang politis dan memulai rekonstruksi terkait kesadaran ekofeminisme.

Periode penjajahan Jepang, pasca kemerdekaan, hingga reformasi juga menawarkan narasi dan persoalan yang relevan untuk membangun pemahaman ekofeminisme dalam pembelajaran sejarah. Pasca Jepang mengambil alih kekuasaan Belanda di Indonesia, alam tetap menjadi objek eksploitasi untuk kepentingan perang (Bachri et al., 2023). Meskipun jauh lebih singkat dari kekuasaan Belanda, Jepang tidak hanya fokus pada eksploitasi minyak, tapi juga bahan pangan seperti yang terjadi di Surakarta. Masyarakat dipaksa menyerahkan padi, berbagai komoditas pertanian dan perkebunan, sehingga mereka kekurangan bahan pangan dan akhirnya mengonsumsi makanan yang tidak layak (Ibrahim, 2004). Dengan pola serupa, eksploitasi alam diiringi dengan penindasan terhadap perempuan. Mengutip Amelia et al. (2025), ratusan ribu perempuan Indonesia telah dipaksa menjadi penghibur pasukan tentara Jepang di masa menjelang Perang Dunia II. Mereka mengalami kekerasan fisik dan seksual, bahkan pasca runtuhnya kekuasaan Jepang, mereka tetap diliputi trauma dan mendapatkan stigma dari masyarakat sekitar.

Otoritarianisme Orde Baru selama tiga dekade juga mewariskan persoalan lingkungan dan opresi terhadap pergerakan perempuan. Pemerintahan pasca kolonial nyatanya tidak jauh berbeda, di mana orientasi pada pembangunan ekonomi seolah mengesahkan eksploitasi. Pratama dan Purwanto (2016) memaparkan bagaimana hutan di Kalimantan Timur dieksploitasi sejak tahun 1970. Hal tersebut selaras dengan penjelasan Jemadu (2021) bahwa Kalimantan Timur dengan hutan hujan tropis terbesar di Indonesia telah dieksploitasi di bawah rezim Orde Baru tanpa perhatian pada sektor sosial dan lingkungan yang terdampak. Rupita (2020) juga mengungkapkan bahwa potensi alam seharusnya bisa menyejahterakan masyarakat lokal, tapi eksploitasi yang masif justru menimbulkan kemiskinan, dan perempuan menjadi pihak yang paling terdampak dalam hal ini.

Kita juga tidak bisa melewatkan persoalan lingkungan yang muncul akibat Revolusi Hijau. Hanifah et al. (2024) menjelaskan, Revolusi Hijau yang bertujuan mengembangkan teknologi pertanian dengan fokus pada peningkatan produksi beras, tidak bisa dipungkiri telah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Namun, program tersebut juga berdampak pada kerusakan lingkungan karena penggunaan bahan kimia dan hilangnya keanekaragaman hayati. Di sisi lain, mengutip (Wieringa, 2010), pemerintah Orde Baru menjinakkan kelompok perempuan revolusioner dan menggantinya dengan ibuisme negara. Sebuah konstruksi tentang perempuan ideal adalah mereka yang menjalankan perannya di ranah domestik sebagai ibu dan istri. Dominasi dengan pola yang sama terhadap alam dan perempuan bahkan juga masih banyak ditemui di sekitar kita hingga saat ini, mulai dari pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit yang mengalienasi masyarakat adat, serta perempuan yang terdampak oleh sistem kerja dan kerusakan lingkungan.

Sudah saatnya narasi sejarah Indonesia dalam pembelajaran tidak melulu dipahami dari sudut pandang politis yang seringkali justru menjauhkan peserta didik dari persoalan nyata di sekitarnya. Apalagi, salah satu tujuan dari belajar sejarah adalah supaya kita bisa belajar dari peristiwa dan dinamika yang pernah ada. Beberapa periode dalam sejarah Indonesia dapat direkonstruksi dengan perspektif yang memberikan ruang pada perempuan, masyarakat, dan dinamika lingkungan. Dari sini, ekofeminisme bisa dibawa untuk melakukan dekonstruksi tidak hanya terkait perspektif politis pada narasi sejarah, tapi juga terkait cara pandang dualis dan hierarkis yang tanpa disadari telah mengakar di tengah masyarakat.

Menuju Ruang Kelas Sejarah yang Ekofeminis

Membawa ekofeminisme dalam pembelajaran sejarah, baik sebagai konsep maupun praktik, menjadi satu hal yang penting untuk dimulai. Dalam pembelajaran sejarah, ekofeminisme akan memberikan ruang pada guru untuk membentuk perspektif peserta didik terhadap lingkungan dan permasalahan hierarki di sekitarnya, satu perspektif holistik yang tidak hanya mencakup pemikiran, tapi juga membangkitkan kesadaran emosional (Spencer & Nichols, 2010). Prinsipnya, mengutip Gardner dan Riley (2007), ekofeminisme dalam pembelajaran tidak bisa dilakukan di kelas tradisional dengan struktur yang hierarkis, karena mengajarkan ekofeminisme adalah sebuah proyek radikal yang akan mempengaruhi bagaimana siswa belajar dan berpikir. Dengan membawa ekofeminisme dalam pembelajaran, peserta didik diajak melihat diri mereka sebagai warga negara yang harus terlibat secara bertanggung jawab dengan masalah sosial yang kompleks di sekitar mereka. Dengan demikian, kelas yang ideal untuk menyampaikan ekofeminisme adalah kelas yang memberikan ruang diskusi dan membawakan materi dengan kontekstual. Pada akhirnya, peserta didik dibawa untuk memahami bahwa pengetahuan memang dikonstruksi, tidak netral, dan memiliki tujuan politis. Dari sini lah dekonstruksi cara berpikir dualis dan hierarkis bisa mulai dijalankan.

Integrasi isu lingkungan, perempuan, dan keterkaitan keduanya dalam materi sejarah, sebagai upaya memperkenalkan konsep dan gerakan ekofeminisme, dapat dilakukan dengan berbagai strategi sebagai berikut:

1. Dialog

Pentingnya dialog dalam hal ini selaras dengan kritik Paulo Freire terhadap pendidikan gaya bank. Dalam kajiannya, Freire menentang pelaksanaan pembelajaran yang hanya menganggap peserta didik sebagai gelas kosong dan memberikan alternatif berupa pembelajaran berbasis dialog. Untuk memaksimalkan dialog, dua pihak yang terlibat di dalamnya harus sama-sama terbuka dan mempunyai harapan akan perubahan (Freire, 2005). Hal ini juga senada dengan pernyataan Harvester dan Blenkinsop (2010), di mana dialog dalam proses pembelajaran harus melibatkan guru dan peserta didik yang mampu saling merangkul dengan hati dan pikiran yang terbuka. Dalam memperkenalkan ekofeminisme, perlu dialog otentik yang didasarkan pada ide untuk peduli dan menghormati sesama makhluk hidup dan alam yang menyediakan kehidupan.

Memperkenalkan ekofeminisme dalam pembelajaran berarti menegaskan urgensi kemanusiaan melalui tindakan interaktif dan dialogis yang merekonstruksi hubungan manusia dan alam di era globalisasi kapitalis (Li, 2007). Melalui pembelajaran yang dialogis, guru dan peserta didik akan mengeksplorasi dan mengungkap bahwa ekofeminisme bukan suatu hal yang monolitik. Selama jalannya pembelajaran, potensi terjadi perbedaan sudut pandang dan pendapat cukup besar, tapi hal tersebut justru akan memperkaya mosaik perspektif peserta didik. Dialog juga akan melatih peserta didik untuk berinteraksi satu sama lain, dan memberikan pengalaman bahwa pengetahuan selalu berubah dan pemahaman baru perlu dibangun. Mereka juga didorong untuk menghasilkan pengetahuan sendiri yang berdasar pada perspektif teoretis (Gardner & Riley, 2007).

2. Pembelajaran Berbasis Masalah (*Problem Based Learning*) dan *Case Method*

Ekofeminisme juga dapat direalisasikan melalui pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran berbasis kasus. Dengan membawa ekofeminisme, pembelajaran sejarah dialihkan dari pembahasan yang filosofis ke analisis masalah konkret (Ludlow, 2010). Pembelajaran berbasis masalah atau PBL telah banyak digunakan dalam berbagai mata pembelajaran. Dalam pembelajaran sejarah, PBL juga sudah menjadi model pembelajaran yang biasa digunakan. Namun, pembelajaran sejarah yang dilakukan dengan berbasis pada masalah lingkungan dan perempuan belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, permasalahan lingkungan dan perempuan serta ekofeminisme sebagai aktivisme dalam rangkaian sejarah Indonesia dapat digunakan sebagai basis masalah.

Dengan PBL, guru bisa menyajikan permasalahan nyata tentang kerusakan alam dan marginalisasi terhadap perempuan dalam satu periode waktu yang sama. Peserta didik kemudian diarahkan untuk menganalisis kesamaan pola di antara keduanya, faktor-faktor penyebab, serta solusi dari permasalahan tersebut. Pembelajaran dengan pola yang sama juga dapat dilakukan dengan pembelajaran berbasis masalah atau *case method*. Perbedaannya, dalam *case method*, guru dapat membuat permasalahan rekaan dan memberikan teori pengantar terlebih dulu. Merujuk Spencer dan Nichols (2010), melalui pembelajaran berbasis masalah, peserta didik tidak hanya dilibatkan aktif dalam proses penyelesaian masalah, tapi juga distimulasi untuk paham dan sadar

bahwa permasalahan lingkungan serta permasalahan tentang hierarki di tengah masyarakat disebabkan oleh tingkah laku manusia dan harus diselesaikan oleh manusia juga.

3. Pembelajaran Berbasis Proyek (*Project Based Learning*) dan *Experiential Learning*

Eko-feminisme juga dapat dibawa dalam pembelajaran sejarah melalui pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran berbasis pengalaman, karena eko-feminisme tidak hanya sekadar konsep, melainkan juga gerakan atau aktivisme. Pembelajaran berbasis proyek akan mengarahkan peserta didik untuk berkelompok dan menyusun proyek bersama. Merujuk Ludlow (2010), peserta didik akan diarahkan untuk melakukan riset tentang permasalahan yang berkaitan dengan eko-feminisme serta menemukan cara untuk mengatasi isu tersebut. Cara tersebut harus dilakukan sebagai tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu, kemudian dipresentasikan dan disusun dalam bentuk laporan yang menjelaskan permasalahan yang dipilih, apa dipelajari tentang masalah tersebut selama melakukan riset, serta tindakan apa yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan selama riset dilakukan.

Peserta didik juga bisa mempelajari eko-feminisme melalui pembelajaran berbasis pengalaman yang melibatkan interaksi dengan komunitas lebih luas di luar kelas. Dengan ini, peserta didik diharapkan mampu menyintesis epistemologi dengan tindakan. Melalui pembelajaran berbasis pengalaman, peserta didik juga akan diposisikan sebagai individu yang berdaya. Hal ini juga berkaitan dengan posisi sekolah yang sudah seharusnya menjadi kontributor penting bagi masyarakat di sekitarnya. Di akhir, peserta didik juga diarahkan untuk merefleksikan pengalaman mereka saat terlibat langsung dalam komunitas masyarakat (Ludlow, 2010). Dalam hal ini, pembelajaran dapat dilakukan dengan field trip ke komunitas di sekitar lingkungan sekolah yang berkaitan dengan esensi eko-feminisme. Seringkali, berbagai komunitas tersebut tidak selalu mengidentifikasi diri secara tersurat bahwa mereka adalah eko-feminis, sehingga guru harus benar-benar memilah komunitas yang tepat.

Dalam pembelajaran sejarah, eko-feminisme bisa mulai diperkenalkan melalui materi-materi yang relevan. Integrasi isu lingkungan, perempuan, dan keterkaitan antara keduanya sebagai eko-feminisme bisa dilakukan pada materi-materi sejarah Indonesia di tiap periode. Berikut beberapa materi esensial dalam mata pelajaran Sejarah yang mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP) Kurikulum Merdeka, yang dapat menjadi ruang untuk mengintegrasikan isu lingkungan, perempuan, dan keterkaitan keduanya sebagai upaya memperkenalkan konsep dan gerakan eko-feminisme:

1. Penjajahan Bangsa Barat

Pada materi ini, pembahasan tentang isu lingkungan, perempuan, serta kesamaan pola antara keduanya dapat dilakukan dengan memberikan penjelasan lebih luas bahwa VOC dan pemerintah kolonial tidak hanya memonopoli rempah-rempah dan komoditas perkebunan, tapi juga mengeksploitasi hutan dan tambang di wilayah Kepulauan Nusantara (Purwanto, 2025). Penekanan juga perlu dilakukan pada kesamaan pola antara eksploitasi alam dengan penindasan terhadap perempuan, bagaimana mereka menjadi kelompok yang rentan terhadap eksploitasi dan

ketimpangan baik secara sosial-ekonomi maupun secara hukum. Topik ini dapat menjadi materi tambahan untuk mata pelajaran Sejarah fase F atau kelas XI SMA sederajat.

2. Pendudukan Jepang

Pola eksploitasi alam dan perempuan yang terjadi di bawah kekuasaan Belanda terus berlangsung sampai periode pendudukan Jepang. Ekonomi yang difokuskan untuk kepentingan perang serta mobilisasi perempuan untuk dijadikan sebagai ianfu, dapat menjadi bahan pembahasan dan diskusi yang menarik. Selama ini, topik pendudukan Jepang untuk fase F atau kelas XI SMA sederajat seringkali lebih banyak mengulas hal-hal politis, seperti kebijakan dan resistensi yang tetap menyoroti sebab-sebab politiknya. Eksploitasi ekonomi dan perempuan ini juga dapat dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini, seperti persoalan tambang dan mulai munculnya pengakuan para penyintas ianfu di berbagai media sosial.

3. Pemerintahan Suharto

Materi Orde Baru untuk peserta didik fase F kelas XII SMA sederajat, seringkali ditampilkan hanya pada pembahasan politiknya saja. Peralihan kekuasaan, kebijakan politik, keberhasilan pemerintah, sampai aksi-aksi protes oleh mahasiswa dan masyarakat, hampir seluruhnya ditampilkan secara politis. Eksploitasi alam yang terus dilakukan, Revolusi Hijau yang membawa dampak signifikan pada lingkungan, serta direduksinya organisasi pergerakan perempuan yang revolusioner menjadi organisasi istri, masih sangat jarang dibahas. Di sisi lain, peran perempuan di era Orde Baru direduksi sebagai ibu dan istri. Hal ini merupakan respon terhadap organisasi-organisasi perempuan revolusioner di periode sebelumnya yang dianggap menyalahi kodrat dan membuat kekacauan. Periode ini menjadi periode yang cukup penting untuk menunjukkan bagaimana pihak-pihak yang mempunyai akses terhadap kekuasaan selalu memanfaatkannya untuk menaklukkan alam dan perempuan.

4. Reformasi

Periode reformasi umumnya disampaikan pada materi sejarah fase F kelas XII SMA sederajat. Berdasarkan buku teks sejarah Kurikulum Merdeka (Safitry et al., 2022), sub-materi yang disajikan pada bab ini belum terlalu mengulas tentang lingkungan dan perempuan, meskipun sudah ada pembahasan terkait bencana. Untuk memperkenalkan konsep ekofeminisme, materi esensial pada bagian ini dapat dipadukan dengan permasalahan dari berbagai kajian terkini tentang perkebunan kelapa sawit dan kondisi buruh perempuan. Selain itu, perlu juga disampaikan eksploitasi atas nama ekonomi dan pembangunan yang masih terus ada hingga saat ini dan membawa dampak buruk bagi lingkungan, seperti pendirian pabrik tanpa memperhatikan AMDAL, pembalakan hutan, dan perburuan liar. Bagaimana para perempuan menjaga keseimbangan lingkungan di era saat ini juga dapat menjadi bahan kajian dan diskusi, seperti peran perempuan buruh perkebunan tembakau di Nusa Tenggara yang berperan dalam konservasi lingkungan, tapi tetap masih kesulitan menjangkau proses perumusan kebijakan di sektor tersebut (Uli, 2026). Selain itu, masih ada berbagai komunitas

perempuan lain yang berperan penting dalam konservasi alam, memandang alam sebagai ibu bumi yang harus dihormati, bukan dieksploitasi.

Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas supaya pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, juga kebutuhan bagi mereka untuk memiliki kesadaran terhadap permasalahan di sekitarnya, terutama soal kerusakan lingkungan, marginalisasi perempuan, dan kesamaan pola di antara keduanya. Kesadaran tentang ekofeminisme diharapkan bukan hanya sebagai transformasi dari pengetahuan, tapi juga fondasi dan awal dari keterlibatan peserta didik sebagai agen masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan lintas zaman. Dalam hal ini lah pembelajaran sejarah diharapkan menjadi ruang yang menawarkan narasi dari zaman ke zaman untuk menjadi latar konkret pengenalan ekofeminisme.

SIMPULAN

Menghadirkan perspektif ekofeminisme dalam pembelajaran sejarah merupakan langkah penting untuk memperluas cara pandang peserta didik terhadap sejarah, yang selama ini cenderung androsentris, elitis, dan kurang memberi ruang pada isu lingkungan serta pengalaman perempuan. Melalui ekofeminisme, pembelajaran sejarah tidak hanya berfungsi menyampaikan peristiwa masa lalu, tetapi juga membantu peserta didik memahami bahwa eksploitasi alam dan marginalisasi perempuan sering kali terjadi melalui pola dominasi yang sama dan terus berulang dalam berbagai periode sejarah Indonesia. Dengan demikian, integrasi ekofeminisme dapat menjadi sarana untuk mendekonstruksi narasi sejarah yang sering cenderung biner, sekaligus membangun kesadaran kritis bahwa persoalan lingkungan dan ketidakadilan gender adalah bagian penting dari dinamika sejarah yang relevan dengan kehidupan masa kini. Oleh karena itu, pembelajaran sejarah perlu diarahkan menjadi ruang reflektif dan kontekstual yang tidak hanya menumbuhkan pemahaman historis, tetapi juga mendorong lahirnya sikap peduli, kritis, dan bertanggung jawab terhadap relasi manusia, perempuan, dan lingkungan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, T. A. (2013). Pembelajaran Sejarah Berwawasan Lingkungan. *Indonesian Journal of Conservation*, (1), 74.
- Ahmad, T. A. (2016). *Sejarah Kontroversial di Indonesia: Perspektif Pendidikan*. Yayasan Pustaka Obor.
- Andaya, B. W. (2006). *The Flaming Womb: Repositioning Women in Early Modern Southeast Asia*. University of Hawai'i Press.
- Astuti, T. M. P. (2012). Ekofeminisme dan Peran Perempuan dalam Lingkungan. *Indonesian Journal of Conservation*, 1(1), 49–60.
- Azifambayunasti, A. (2023). *Konstruksi Gender dalam Buku Teks Sejarah (Analisis Wacana Kritis Buku Sejarah Indonesia Kelas XI dan XII Kurikulum 2013 Revisi 2017)*. Universitas Sebelas Maret.

- Bachri, D. A., Hasan, S. H., & Mulyana, A. (2023). Perang Dunia II: Strategi perang darat jepang. *FACTUM: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, 12(2), 1. <https://doi.org/10.17509/factum>
- Baudoin, A., Bosc, P.-M., Bessou, C., & Levang, P. (2017). A short history of palm oil in Indonesia: A 'success story.' In Review of the diversity of palm oil production systems in Indonesia: Case study of two provinces: Riau and Jambi. *Center for International Forestry Research*, 1–6. <http://www.jstor.org/stable/resrep16293.4>
- BBC News Indonesia. (2020). Kisah para perempuan penjaga hutan Aceh: “Kami lebih didengar oleh para pembalak liar.” <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-55300012>.
- Birkeland, J. (1993). Linking Theory and Practice. In G. Gaard (Ed.), *Ecofeminism: Women, Animals, Nature* (2). Temple University Press.
- Blackburn, S. (2004). *Women and the State in Modern Indonesia*. Cambridge University Press.
- Boomgard, P. (2008). *Frontiers of Fear: Tigers and People in the Malay World, 1600-1950*. Yale University Press.
- Cresswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Djono, Joebagio, H., & Abidin, N. F. (2020). *Pembelajaran Sejarah Naratif-Dekonstruktif: Suatu Kajian Konseptual Awal*. 20, 19.
- Djuang, D. (n.d.). *The Three Big Oil Companies in Indonesia before 1945*. <https://oilandgascourses.org/the-three-big-oil-companies-in-indonesia-before-1945/>.
- Dobbin, C. (1983). *Islamic revivalism in a changing peasant economy: Central Sumatra, 1784-1847*. Routledge.
- Epstein, T. (2016). The relationship between narrative construction and identity in History Education: implications for teaching and learning. *Educar Em Revista*, (60), 161–170. <https://doi.org/10.1590/0104-4060.46024>
- Fahimah, S. (2017). Ekofeminisme: teori dan gerakan. *Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 1(1).
- Farawita, F. (2018). Degradasi Ekologi dan Kapitalisme Revolusi Hijau Dalam Buku Teks Sejarah SMA. *HISTORIA: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah*, 1(2).
- Firdaus, F. (2020). *The women of Kendeng set their feet in cement to stop a mine in their lands. This is their story*. <https://news.mongabay.com/2020/11/the-women-of-kendeng-set-their-feet-in-cement-to-stop-a-mine-in-their-lands-this-is-their-story/>.
- Fitri, A. I., & Akbar, I. (2017). Gerakan sosial perempuan ekofeminisme di pegunungan kendeng provinsi jawa tengah melawan pembangunan tambang semen. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1).
- Freire, P. (2005). *Pedagogy of The Oppressed*. The Continuum International Publishing Group.
- Galudra, G., & Sirait, M. (2009). A Discourse on Dutch Colonial Forest Policy and Science in Indonesia at the Beginning of the 20th Century. *International Forestry Review*, 11(4).
- Gardner, C. V., & Riley, J. E. (2007). Breaking Boundaries: Ecofeminism in the Classroom. *The Radical Teacher*, (78), 24–33.
- Gibson, L., Peck, C. L., Miles, J., & Duquette, C. (2025). Historical thinking: Trends, critiques, and future directions. In *Current Opinion in Psychology* (Vol. 65). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2025.102088>

- Hanifah, Z. M., Elfhani, N., Hafiza, M. F. I., & Ribawati, E. (2024). PENGARUH REVOLUSI HIJAU PADA MASA ORDE BARU DI INDONESIA. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 5(4).
- Harvester, L., & Blenkinsop, S. (2010). Environmental Education and Ecofeminist Pedagogy: Bridging the Environmental and the Social. In *Canadian Journal of Environmental Education* (Vol. 15).
- Howell, N. R., & et al. (2023). *Ekofeminisme: Arah Baru dan Apa yang Perlu Kita Ketahui*. Odise Publishing.
- Ibrahim, J. (2004). Eksploitasi ekonomi pendudukan Jepang di Surakarta 1942-1945. *Humaniora*, 16(1), 35.
- Iryanti, D. (2025). *Krisis Lingkungan 2025: 4 Catatan WALHI yang Harus Diketahui*. <https://Environment-Indonesia.Com/Krisis-Lingkungan-2025-4-Catatan-Walhi-Yang-Harus-Diketahui/>.
- Jemadu, A. (2021). Belajar dari Kegagalan Politik Pengelolaan SDA Orde Baru: Studi Kasus Kalimantan Timur. *Indonesian Journal of International Law*, 4(4). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol4.4.160>
- Karima, E. M. (2017). Kehidupan Nyai dan Pergundikan Di Jawa Barat Tahun 1900-1942. *Diakronika*, 17(1), 1.
- Kartodirdjo, S. (1992). *Pendekatan ilmu sosial dalam metodologi sejarah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Khalid, K. (2018). *Indonesia: Oil palm plantations and their trace of violence against women*. <https://Www.Wrm.Org.Uy/Bulletin-Articles/Indonesia-Oil-Palm-Plantations-and-Their-Trace-of-Violence-against-Women>.
- King, Y. (1983). The Ecology of Feminism and the Feminism of Ecology. *Harbinger: The Journal of Social Ecology*, 1(2), 16.
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Tiara Wacana.
- Kunz, Y., Hein, J., & Sobirin, M. (2024). Beyond Protection, toward Respect: Struggle for Environmental Justice in the Kendeng Mountains. *Society and Natural Resources*, 37(5), 826–844. <https://doi.org/10.1080/08941920.2023.2267497>
- Kurniawan, G. F., Sutimin, L. A., & Warto. (2019). Dominasi orang-orang besar dalam sejarah indonesia: kritik politik historiografi dan politik ingatan. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 4(1), 36–52.
- Kurniawan, H. (2014). Nyai Dalam Pergundikan: Pendorong Munculnya Kaum Indo di Hindia Belanda. *Historia Vitae: Seri Pengetahuan Dan Pengajaran Sejarah*, 28, 136.
- Kusnoto, Y. (2022). Menyoal Narasi Kesadaran Lingkungan Melalui Buku Teks Pelajaran Sejarah Di SMA. *Jurnal Historica*, 6(2), 112–130.
- Li, H. L. (2007). Ecofeminism as a pedagogical project: women, nature, and education. *Educational Theory*, (3).
- Locher-Scholten, E. (2000). *Women and the colonial state: essays on gender and modernity in the Netherlands Indies 1900-1942*. Amsterdam University Press. www.ssoar.info
- Ludlow, J. (2010). Ecofeminism and Experiential Learning: Taking the Risks of Activism Seriously. *Transformations: The Journal of Inclusive Scholarship and Pedagogy*, 21.

- Mahardika, M. D. G. (2020). Kepentingan Rezim Dalam Buku Teks Sejarah di Sekolah. *ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah*, 16(1).
- Martyn, E. (2005). *The Women's Movement in Post-colonial Indonesia*. Routledge Curzon.
- Maulana, R., & Supriatna, N. (2019). Ekofeminisme: Perempuan, Alam, Perlawanan atas Kuasa Patriarki dan Pembangunan Dunia (Wangari Maathai dan Green Belt Movement 1990-2004). *FACTUM: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, 8(2).
- Mies, M., & Shiva, V. (1993). *Ecofeminism. Kali for Women*.
- Mies, M. (2021). *Patriarchy and accumulation on a world scale : women in the international division of labour*. Zed Books.
- Milko, V., & Alangkara, D. (2024). In Indonesia, women ranger teams go on patrol to slow deforestation. <https://apnews.com/article/Aceh-Indonesia-Deforestation-Forestry-Women-Rangers-83edf59f3914a512aa5031829d290d98>.
- Pradipta, L. (2017). Dealing With Discrimination: Women Labor and Oil Palm Plantation Expansion in Indonesia. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, 7(1), 19–28.
- Pratama, A. R., & Purwanto, B. (2016). *Eksplorasi Hutan Di Kalimantan Timur Pada Masa Orde Baru, 1970-1998*. Universitas Gadjah Mada.
- Priyambodo, U. (2024). Kisah Perempuan Raja Ampat Melestarikan Alam Lewat Kearifan Lokal. <https://nationalgeographic.grid.id/read/134051300/kisah-perempuan-raja-ampat-melestarikan-alam-lewat-kearifan-lokal?page=all>.
- Purwanto, B. (2001). Historisisme Baru dan Kesadaran Dekonstruktif: Kajian Kritis Terhadap Historiografi Indonesiasentris. *Humaniora*, 8(1), 29–44.
- Purwanto, B. (2025). *Jejak Masa Lalu di Masa Kini dan Masa Depan*. Penerbit Selak Lali.
- Rahayu, R. I. (2007). *Konstruksi Historiografi Feminisme Indonesia dari Tutur Perempuan*.
- Reid, A. (1988). *Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680*. Yale University Press.
- Wulan, T. R. (2007). Ekofeminisme Transformatif: Alternatif Kritis Mendekonstruksi Relasi Perempuan dan Lingkungan. *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, Dan Ekologi Manusia*, 1, 105–130.
- Ricklefs, M. C. (2001). *A History of Modern Indonesia since c. 1200*. Palgrave.
- Ridhoi, R. (2023). Memikirkan kembali tradisi sejarah lingkungan di Indonesia. *Sejarah Dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya*, 17(2), 131. <http://journal2.um.ac.id/index.php/sejarah-dan-budaya/index>
- Utama, T. R. (2024). Narasi sejarah yang tidak setara: mengurangi bias gender dalam buku teks sejarah Indonesia. *Historiography: Journal of Indonesian History and Education*, 4(4), 442–456.
- Riyanto, G. (2024). Membaca ulang tradisi sasi: Antara sejarah, realita, dan harapan untuk konservasi. <https://theconversation.com/membaca-ulang-tradisi-sasi-antara-sejarah-realita-dan-harapan-untuk-konservasi-262798>.
- Rupita. (2020). Kehidupan Perempuan Perbatasan: Kemiskinan dan Eksploitasi (Kajian Kasus di Perbatasan Jagoi Indonesia-Malaysia Kalimantan Barat). *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 135. <http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya>
- Safitry, M., Utami, I. W. P., & Ratmanto, A. (2022). *Sejarah untuk SMA/MA kelas XII*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

- Shiva, V. (1988). *Staying alive : women, ecology, and survival in India*. Kali for Women.
- Spencer M. E. and Nichols, S. E. (2010). Exploring Environmental Education Through Ecofeminism: Narratives of Embodiment of Science. In B. and W. S. Bodzin Alec M. and Shiner Klein (Ed.), *The Inclusion of Environmental Education in Science Teacher Education* (pp. 255–266). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-90-481-9222-9_17
- Susanto, H., Fatmawati, S., & Fathurrahman, F. (2022). Analisis Pola Narasi Sejarah dalam Buku Teks Lintas Kurikulum di Indonesia. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan*, 6(2), 228–243. <https://doi.org/10.29408/fhs.v6i2.6632>
- Amelia, Y. T, Hazimah, H. D., Rahmadani, N. A., Rosyid, A. N., Hendrian, R. C., Afliarso, A., Pradana, Y. A., Ilham, A., Utami, A. P., & Sihombing, R. (2025). Jugun Ianfu: Jejak Kelam dalam Sejarah Perempuan Indonesia. *Mediasi*, 4(2), 338–351. <http://jurnalilmiah.org/journal/index.php/mediasi>
- Van Klinken, G. (2025). Ekofeminisme Dari dominasi menuju jaring kehidupan. *Inside Indonesia*, (11a).
- Warren, K. (2000). *Ecofeminist philosophy : a western perspective on what it is and why it matters*. Rowman & Littlefield.
- Wieringa, S. E. (2010). *Penghancuran gerakan perempuan: politik seksual di Indonesia pascakejatuhan PKI* (Harsutejo, Tran.). Galang Press.
- Wulandari, A. (2020). Menghadirkan perempuan dalam historiografi pasca merdeka: membangun karakter bela negara melalui narasi sejarah. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 10(2). <https://mediaindonesia.com/read/>
- Yulia, D. (2016). Perspektif Gender Dalam Historiografi Indonesia. *Jurnal Dimensi*, 5(2), 1–6.